



1 MEI TANPA PERINGATAN HARI BURUH

Pekerja Perhotelan Paling Banyak Dirumahkan

UMBULHARJO (MERAPI) - Sebanyak 1.488 pekerja, yang didominasi sektor perhotelan di Kota Yogyakarta harus dirumahkan maupun mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Yogyakarta juga tidak akan mengadakan kegiatan memperingati Hari Buruh atau May Day pada Jumat (1/5) besok.

Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Emy Indaryati, Rabu (29/4), mengutarakan, jumlah pekerja tersebut berasal dari 227 perusahaan yang sudah melapor. "Di Kota Yogyakarta terdapat sekitar 1.600 perusahaan yang wajib lapor," kata Emy.

Dari 1.488 pekerja yang berdomisili di Kota Yogyakarta dan

terdampak pandemi corona tersebut, sebanyak 1.426 pekerja dirumahkan, dan 62 pekerja mengalami PHK. Namun demikian, jika ditotal secara keseluruhan tanpa membedakan asal domisili pekerja, maka dari 227 perusahaan di Kota Yogyakarta sudah ada 7.299 pekerja yang dirumahkan, 209 pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dua pekerja sakit.

Menurut dia, sebagian besar pekerja yang terpaksa dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19 berasal dari sektor perhotelan yaitu 44,49 persen diikuti sektor perdagangan 20,26 persen, jasa sebanyak 13,2 persen dan usaha restoran sebanyak 9,69 persen.

Emy menambahkan, pandemi Covid-19 juga menyebabkan sejumlah kegiatan yang sudah direncanakan harus dibatalkan, salah satunya peringatan Hari Buruh yang rutin digelar tiap tahun bersama dengan serikat pekerja dan perusahaan.

Sementara itu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Yogyakarta Tri Agus Haryadi mengatakan, pihaknya tidak meng-

adakan kegiatan untuk memperingati Hari Buruh pada Jumat (1/5). Pihaknya berharap pemerintah memperhatikan pada pekerja yang kena PHK dan dirumahkan karena dampak wabah Covid-19.

"Sebagian pekerja yang dirumahkan digaji separoh. Adanya Program Kartu Prakerja sedikit membantu," papar Agus.

Secara terpisah Wakil Walikota Yogyakarta Herœ Poerwadi menyampaikan Pemkot Yogyakarta masih mengolah data dari perusahaan yang melaporkan karyawan dirumahkan dan di-PHK. Rencananya pekerja yang kena PHK dan dirumahkan akibat terdampak wabah Covid-19 akan mendapatkan bantuan jaring pengaman sosial.

(Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005